

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pesat dalam teknologi digital telah mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk mengadopsi transformasi digital sebagai upaya meningkatkan layanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Di Indonesia, kebutuhan akan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah semakin mendesak, khususnya dalam konteks inisiatif Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah melalui PERPRES Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 (Fitri Rahmadany, 2024) (Saputri, 2019).

Digitalisasi keuangan daerah merupakan komponen penting dari upaya transformasi digital yang lebih luas dalam sektor publik di Indonesia. Implementasi sistem e-government telah memungkinkan komunikasi dan pengelolaan data yang lebih efisien antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Namun, kerangka hukum yang ada di Indonesia belum secara memadai mengatur perlindungan data pribadi, yang merupakan aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap layanan e government (Iswandari, 2021).

Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, dilakukan melalui pendekatan modern dalam pengelolaan birokrasi yang mengintegrasikan teknologi digital dan prinsip-prinsip agile government untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas dalam pelayanan publik. Dalam konteks ini, Reformasi Birokrasi dicapai melalui penerapan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) dalam setiap aspek operasional birokrasi, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Busri et al., 2023).

Pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan di Indonesia secara substansial telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implementasi regulasi tersebut diwujudkan melalui penerapan e-government di berbagai instansi pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, indeks SPBE Nasional memperoleh nilai sebesar 2,34 dari skala 5 dan masuk kategori “cukup”. Selanjutnya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh United Nation tentang penerapan e-government di berbagai negara, Indonesia menempati peringkat 77 dari 193 negara di tahun 2022 (Kementerian PAN RB, 2023).

Kinerja digitalisasi pada sektor publik secara umum telah mengalami peningkatan dan berbagai perbaikan. Upaya perbaikan dalam peningkatan kualitas SPBE tidak cukup hanya dilakukan dengan tumbuhnya berbagai aplikasi di instansi pemerintahan. Secara konseptual e-government harus mampu memberikan dampak pada reformasi administratif (administrative reform) dengan adanya integrasi tata kelola, perampingan proses kerja, peningkatan transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Rusdy & Flambonita, 2023).

Secara teoritis ruang lingkup transformasi digital tidak hanya terbatas pada aspek teknologi digital saja, namun mencakup keterlibatan jenis-jenis sumber

daya yang terintegrasi secara strategis. Faktor kunci transformasi digital terletak pada interaksi tiga aspek kunci yaitu organisasi, teknologi dan sumber daya manusia (Oktaviani et al., 2023). Transformasi digital diartikan sebagai upaya strategis untuk merespons disrupsi dengan menggunakan teknologi digital untuk merubah alur penciptaan nilai (value creation path) melalui perubahan struktural (struktur, budaya, kepemimpinan dan tata kelola)(Firmansyah et al., 2022). Transformasi digital keuangan daerah merupakan elemen kunci dalam mewujudkan agile government pada reformasi birokrasi pemerintah daerah. Agile government sendiri merujuk pada kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, yang sangat penting dalam konteks dinamika sosial dan ekonomi saat ini. Digitalisasi dalam sektor keuangan daerah tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan fondasi dari good governance (Pratama & Maulina, 2025).

Terdapat variasi dalam capaian kinerja keuangan dan pelayanan di puskesmas wilayah Kabupaten Ponorogo. Beberapa puskesmas menunjukkan kinerja keuangan baik, sementara lainnya menghadapi tantangan, seperti defisit akibat pengeluaran operasional berlebihan. Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran menjadi faktor penting. Namun, efisiensi tidak selalu diiringi efektivitas dalam pelayanan. Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-11/PB-2021, belum semua puskesmas di Kabupaten Ponorogo melakukan evaluasi keuangan BLUD sesuai aturan ini. Peraturan tersebut mengatur evaluasi tingkat kesehatan keuangan BLUD berdasarkan indikator likuiditas, efisiensi, efektivitas, dan kemandirian dengan

menggunakan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan. Pentingnya pengelolaan keuangan yang hati-hati pada BLUD Puskesmas menjadi fokus utama untuk mendukung realisasi pendapatan, mempertahankan saldo kas yang sehat, dan memastikan kelangsungan pelayanan kesehatan berkualitas.

Salah satu aspek penting dari transformasi digital keuangan adalah kemampuannya untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan layanan keuangan. Menurut Sudrajat, penerapan teknologi informasi dalam layanan publik dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan transparan (Pratama & Maulina, 2025). Dengan memanfaatkan platform digital, pemerintah daerah dapat menyediakan layanan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan bahwa pendekatan agile dapat membantu pemerintah dalam merespons tantangan yang dihadapi dengan lebih cepat dan efektif (Fitri Rahmadany, 2024). Selain itu, digital finance juga berperan dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan pengambilan keputusan yang berbasis data. Transformasi digital dapat meningkatkan kemampuan pemerintah untuk menganalisis data dan informasi, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat (Kusumawati, 2024).

Dengan adanya data yang akurat dan terkini, pemerintah daerah dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih tepat, sehingga menciptakan layanan publik yang lebih baik. Masalah digitalisasi keuangan daerah dalam mewujudkan agile government pada reformasi birokrasi di pemerintah daerah di Indonesia mencakup berbagai tantangan yang berkaitan dengan implementasi teknologi, budaya organisasi, dan kapasitas sumber daya manusia.

Agile government, yang didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk merespons perubahan dengan cepat dan efisien, sangat bergantung pada infrastruktur digital yang memadai dan dukungan dari seluruh elemen pemerintahan. Transformasi digital ini bukan hanya sekadar menciptakan efisiensi administratif, tetapi juga menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan bagi seluruh warga negara (Cahya Ningtyas & Angin, 2023).

Beberapa tantangan dalam digital keuangan daerah lainnya yaitu kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, karena pemerintah daerah sering kali menghadapi kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang ada (Kurnia et al., 2022). Tantangan mendasar lainnya seperti kurangnya aksesibilitas terhadap teknologi digital, ketimpangan antarwilayah dalam infrastruktur teknologi, serta kurangnya literasi digital di beberapa lapisan masyarakat menjadi hambatan utama dalam kesuksesan implementasi layanan publik berbasis digital. Aspek budaya organisasi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital. Perubahan dalam pola pikir dan budaya kerja di kalangan pegawai pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung agile government. Perubahan dalam sistem sosial dan budaya organisasi sering kali lebih lambat dibandingkan dengan perubahan teknis (Gangneux & Joss, 2022). Selain itu, tantangan dalam pengelolaan data juga menjadi perhatian. Pengelolaan data yang efektif sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, yang merupakan salah satu prinsip dasar dari agile government (Lillie & Eybers, 2019).

Urgensi topik pada kajian ini terletak pada potensi manfaat yang dapat diberikan oleh transformasi digital, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Teknologi digital dapat menyederhanakan proses administratif, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki kualitas penyampaian layanan publik. Selain itu, pandemi COVID-19 telah mempercepat kebutuhan akan pemerintahan yang tangkas dan responsif, yang semakin menegaskan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah (Kurniawan & Mumpuni Arti, 2020). Selain itu, transformasi digital dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Namun, untuk mencapai hal ini, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa sistem yang diterapkan tidak hanya efisien, tetapi juga mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Menurut Permenkes No. 43 Tahun 2019 Puskesmas merupakan unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dengan menggunakan transformasi digital Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Pelayanan Kesehatan merupakan hak asasi masyarakat dan wajib dilaksanakan demi Pembangunan Kesehatan. Hal ini harus dilihat sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung Pembangunan ekonomi, serta berperan penting dalam Upaya pengentasan kemiskinan.

Permasalahannya meliputi kesenjangan Kesehatan; beban ganda penyakit, kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan layanan Kesehatan. Perlindungan Masyarakat dibidang kedokteran dan pangan. Juga pola hidup bersih dan sehat. Permasalahan penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan akses layanan Kesehatan bagi Masyarakat miskin, penanganan gizi buruk, penanganan wabah penyakit menular, penyediaan layanan Kesehatan di wilayah terdampak bencana dan peningkatan jumlah tenaga Kesehatan. Tindak lanjutnya Pembangunan Kesehatan akan meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan Kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan, meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, memperkuat Upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit, serta meningkatkan status gizi. Peran penyediaan pelayanan merupakan salah satu elemen kunci keberhasilan, dan hal ini mengacu pada pemerintah. Pemerintah sebagai penyelenggara menyediakan beberapa sarana/fasilitas Kesehatan yang banyak terdapat di Masyarakat termasuk puskesmas.

Puskesmas sebagai penyedia pelayanan Kesehatan disini memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap pemerintah agar mampu memberikan pelayanan jasa Kesehatan yang berkualitas. Dimana sesuai dengan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pada dasarnya masih terdapat suatu kekurangan pada pihak pemberi pelayanan Kesehatan, seperti misalnya kurangnya keramahan petugas, terjadi kurangnya dukungan dana, sehingga terjadi suatu ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan karena tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh pelanggan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana keberhasilan penerapan transformasi digital Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo berdasarkan indikator peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, penghematan biaya operasional, kemudahan monitoring dan pelaporan, peningkatan layanan publik serta mendukung kolaborasi dan integrasi antar instansi?

C. Fokus Penelitian

1. Mengeksplorasi peningkatan efisiensi dalam penerapan transformasi digital Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2. Mengeksplorasi transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan transformasi digital Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
3. Mengeksplorasi penghematan biaya operasional dalam penerapan transformasi digital Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
4. Mengeksplorasi kemudahan monitoring dan pelaporan dalam penerapan transformasi digital Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

5. Mengeksplorasi peningkatan layanan publik dalam penerapan transformasi digital Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
6. Mengeksplorasi pemberian dukungan kolaborasi dan integrasi antar instansi dalam penerapan transformasi digital Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana transformasi digital dalam Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Sehingga kedepannya bisa diterapkan transformasi digital dalam Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Puskesmas

Penelitian ini dapat membantu Puskesmas meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan BLUD serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat sehingga tercipta kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan yang berkualitas.

b. Bagi akademisi


Penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori dan konsep yang terkait dengan pengelolaan keuangan BLUD dan transformasi digital. Menyumbangkan pengetahuan baru pada literatur mengenai transformasi puskesmas. Hal ini dapat memperkaya literatur yang ada.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan terkait “Evaluasi Penerapan Transformasi Digital Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas Sukorejo Kabupaten Ponorogo” sebagai berikut:





Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Nama Jurnal dan Link Jurnal	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	(Lulu Aulia & Nur Fadhillah Ahmad Hasibuan, 2023)	Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Studi Kasus: Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan	Jurnal Ekonomi dan Manajemen Jurnal JEKMA Vol 2 No. 3 Oktober 2023 https://pdfs.semanticscholar.org/fd38/d80616cf1db85b4ed5cc13dc3197acf49b79.pdf 	Kualitatif Deskriptif Studi kasus	Terdapat kendala-kendala yang menghambat pengelolaan RSUD Panyabungan dalam pelaksanaan PPK-BLUD yaitu kendala sumber daya manusia, kendala sarana prasarana, dan kendala kebijakan pemerintah, penyusunan laporan keuangannya masih secara manual, kelengkapan dokumen pendukung yang belum memadai, serta aspek komunikasi yang kurang baik Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ada dalam pengelolaan RSUD Panyabungan ialah staf	Jurnal tersebut meneliti pengelolaan keuangan BLUD, sedangkan penelitian ini akan meneliti transformasi digital pengelolaan keuangan BLUD

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Nama Jurnal dan Link Jurnal	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
					pengelola yang ada pada rumah sakit perlu mengikuti DIKLAT dan Bimtek tentang pengelolaan BLUD.	
2	(Muhammad Kahfi, 2024)	Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Entitas Pelatihan Aparatur Pemerintah	Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 5, No. 2, Juni 2024, pp. 35-48 https://doi.org/10.56259/jwi.v5i02.270	Kualitatif Deskriptif Studi kasus	Pendirian BLUD memerlukan pemenuhan beberapa persyaratan administratif, substantif, dan teknis. Selain itu, Pasal 209 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan peran strategis BPSDM dalam pengelolaan pendapatan. Dasar hukum untuk pengelolaan keuangan BLUD tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, yang memberikan	Jurnal tersebut meneliti pola pengelolaan keuangan BLUD, sedangkan penelitian ini akan meneliti transformasi digital pengelolaan keuangan BLUD

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Nama Jurnal dan Link Jurnal	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
					fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan, belanja, kas, utang, piutang, investasi, barang, sumber daya manusia, dan remunerasi.	
3	(Silalahi et al., 2021)	Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Jurnal Perspektif – Januari Vol 11. No. 1 (2022) DOI: 10.31289/perspektif.v11i1.5367	Kualitatif Deskriptif Studi kasus	Dari indikator Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>) setelah penerapan PPK-BLUD di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai, terdapat perubahan dimana sebelumnya proses pengelolaan anggaran, keuangan, dan pelaporan yang selama ini murni harus berdasarkan peraturan keuangan dengan mekanisme APBD. Namun dengan penerapan PPK-BLUD, seluruh pendapatan yang peroleh RSUD Djoelham dapat langsung dikelola	Jurnal tersebut meneliti pola pengelolaan keuangan BLUD, sedangkan penelitian ini akan meneliti transformasi digital pengelolaan keuangan BLUD

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Nama Jurnal dan Link Jurnal	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
					dan dipergunakan untuk kebutuhan dan keperluan RSUD.	
4	(Matondang et al., 2025)	Analisis Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi	Jurnal of Law Education and Business Vol. 3 No. 1 (2025) 	Kualitatif Deskriptif Studi kasus	Teknologi misalnya cloud accounting dan big data analytics sudah meningkatkan produktivitas laporan keuangan dengan mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan akurasi data. Namun, tantangan seperti kesiapan infrastruktur teknologi dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia perlu diatasi.	Jurnal tersebut meneliti transformasi digital keuangan negara, sedangkan penelitian ini akan meneliti transformasi digital pengelolaan keuangan BLUD
5	(Fitri Rahmadany, 2024)	Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan	Jurnal Imiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 16(2), 195–209 https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i2.4809	Kualitatif Deskriptif Studi kasus	Transformasi digital keuangan daerah belum optimal, masih terhambat oleh kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparat, serta	Jurnal tersebut meneliti transformasi digital keuangan daerah, sedangkan penelitian ini akan

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Nama Jurnal dan Link Jurnal	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
		<i>Agile government</i> pada Reformasi Birokrasi 4.0			ketimpangan infrastruktur teknologi, dan tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya infrastruktur. Secara keseluruhan, transformasi digital dan <i>agile government</i> saling mendukung dalam upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Pendekatan	meneliti transformasi digital pengelolaan keuangan BLUD
6	(Aisyah et al., 2025)	Transformasi Digital dalam Manajemen Keuangan: Dampaknya terhadap Pengambilan Keputusan Investasi	Prosiding Seminar Nasional Manajemen Vol 4 (1) 2025: 1164-1168 http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSM/index	Kualitatif Deskriptif Studi kasus	transformasi digital dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan investasi, namun juga menghadirkan tantangan dalam hal keamanan data dan adaptasi teknologi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyusun strategi yang	Jurnal tersebut meneliti transformasi digital keuangan daerah, sedangkan penelitian ini akan meneliti transformasi digital pengelolaan keuangan BLUD

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Nama Jurnal dan Link Jurnal	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
					tepat dalam mengintegrasikan teknologi digital agar dapat memaksimalkan potensi manfaat serta memitigasi risiko yang muncul	

